

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam Bab IV terhadap peraturan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Peraturan dengan Prinsip HAM dan Lingkungan Hidup:

- a) Beberapa peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mineral dan batubara di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan HAM dan lingkungan hidup, namun pengaturan terkait prinsip partisipasi masyarakat dan pemenuhan hak masyarakat adat masih minim. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan turunannya dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan turunannya memberikan landasan hukum untuk perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat.
- b) Kendati demikian, banyak kasus menunjukkan bahwa pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan masih sering terjadi di wilayah pertambangan. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya memadai dalam memastikan pemenuhan prinsip HAM atas lingkungan hidup.

2. Permasalahan Hukum dan Kelemahan Peraturan Perundang-Undangan:

- a) Terdapat beberapa kelemahan dalam regulasi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan. Dalam hal ini, kurangnya penegakan hukum, minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan lemahnya mekanisme pengawasan serta tidak adanya pengaturan mengenai pemenuhan hak masyarakat adat.

3. Perlindungan HAM dan Lingkungan Hidup:

- a) Perlindungan HAM atas lingkungan hidup di wilayah pertambangan masih memerlukan perhatian lebih, khususnya dalam hal penanganan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan.
- b) Beberapa kasus seperti pencemaran air, kerusakan lahan, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat akibat aktivitas tambang menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengawasan dan penegakan hukum.

5.2 Saran

1. Peningkatan Penegakan Hukum dan Pengawasan:

- a) Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kapasitas lembaga pengawas dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.
- b) Penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan dan HAM oleh perusahaan tambang harus dilakukan secara konsisten untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

2. Partisipasi Masyarakat:

- a) Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas pertambangan harus ditingkatkan. Mekanisme konsultasi publik yang transparan dan inklusif perlu diterapkan untuk memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak masyarakat terdampak diakomodasi dengan baik.
- b) Masyarakat harus diberikan akses informasi yang memadai terkait rencana dan dampak kegiatan pertambangan, serta dilibatkan dalam proses penyusunan dan evaluasi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:

- a) Transparansi dalam proses perizinan dan operasional tambang harus ditingkatkan untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan

wewenang. Pemerintah harus memastikan bahwa semua proses perizinan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b) Akuntabilitas perusahaan tambang dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perlu ditingkatkan. Perusahaan harus secara rutin melaporkan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) dan dampak lingkungan dari operasional mereka.

4. Penguatan Regulasi dan Kebijakan:

- a) Regulasi dan kebijakan terkait pertambangan perlu diperkuat dengan mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang telah diakui, seperti prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Dewan HAM PBB, IGF, dan ICMM.
- b) Pemerintah perlu mengevaluasi dan merevisi peraturan perundang-undangan yang ada untuk mengatasi kelemahan dan inkonsistensi yang ditemukan, serta memastikan bahwa regulasi tersebut mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap HAM dan lingkungan hidup.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dapat berjalan dengan lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akib, M., *Hukum Lingkungan, Perspektif Global Dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Aprita, S (et.al), *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Arinanto, S., *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*
- Ashidiqqie, J., *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005 .
- Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Brems, E., *Human Rights: Universality and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, London, 2001.
- Hardjasoemantri, K., *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjahmada University Press, 1999
- Kurnia, Mahendra Putra, *Hukum Kewilayahan Indonesia, Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial*, Malang: UB Press, 2011.
- Manan, B., *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung, 1995.
- Marbun, Rocky, dkk. *Kamus Hukum Lengkap, Cetakan ke I*, Jakarta: Visimedia, 2012.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Nowak, M., *Introduction to The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 2003.
- Purbopranoto, K., *HAM dan Pancasila, Pradya Paramita*, Jakarta, 1979.
- Smith, Rhona K.M., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Soegianto, Agoes, *Ilmu Lingkungan Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Supramono, Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, 2011.

Artikel dan Penelitian

Azwari, F., Rajab. A, *Dampak Pertambangan Batubara terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat di RT. 17, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Negara, Buletin Poltanesa* (Vol. 22 No. 1, 2021).

Fitriyanti R, *Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi*, Jurnal Redoks (Vol. 1 No. 1, 2016).

Handayani, Marsya Mutmainah, Julio Castor Achmadi, and Prilia Kartika Apsari. *Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 8, no. 1 (2021): 152-192.

Ivan S. A. *Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dalam Lingkungan Pelabuhan Wisata di Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nusa Penida*. (Karya Tulis, UNIMAR, 2019).

Kospa, H.S.D., *Kajian Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Oleh Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus PT.Antam Tbk)*, Jurnal Ilmiah Tekno Global (Volume 9 No. 2 2020).

Kusniati, R, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum (Vol. 4 No.5, 2011).

Listiyani N. *Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara*. Al-Adl: Jurnal Hukum. 2017 Jul 3;9(1):67-86.

Rahbiah R, *Analisis Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan Batubara Terhadap Hak Warga Masyarakat di Wilayah Tambang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan Mab, Kalimantan, 2020).

Risal, Samuel, DB Paranoan, and Suarta Djaja. 2017. *Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman*. Jurnal Administrative Reform (JAR) 1, no. 3: 516–30. <https://doi.org/10.30872/JAR.V1I3.482>.

Saleh, I. N. S., & Gadsia Spaltani, B., *Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat*, JATISWARA (Vol. 37(2), 163–175, 2022) <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.402>

Sabardi, Lalu, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yustisia, FH UNS Edisi 88 (2014): 169-173.

Suciadi, Muhammad, Eko Priyo Purnomo, and Aulia Nur Kasiwi. 2020. *Eksternalitas Positif Tambang Batubara Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kutai Kartanegara*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2: 267. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2458>.

Teja, Mohamad. 2015. *Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir*. *Jurnal Aspirasi*, 88–89. <https://doi.org/10.1515/9783110915655-023>.

Knox, John H. *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*. 2018.

Sumber Hukum

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Pasal 1 butir 1 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia.

Komite Hak Asasi Manusia, *Framework Principles on Human Rights and the Environment*, 2018

Komite Hak Asasi Manusia, *Komentar Umum No. 6 (1982) tentang hak untuk hidup*.

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, *Komentar Umum No. 14 (2000) tentang hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai*.

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum No. 3 (1990) tentang sifat kewajiban Negara-negara pihak.

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum No. 20 (2009) tentang non-diskriminasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Komnas HAM, Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

Konvensi Akses terhadap Informasi, Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Akses terhadap Keadilan dalam Masalah Lingkungan.

Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat.

Protokol Tambahan pada Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia di Bidang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia.

Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN.

Konvensi Hak Anak.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Jakarta, 2018, hlm, 6.

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Piagam PBB.

Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Hak Budaya.

Program Lingkungan PBB, Global Environment Outlook 3 (2002).

Putusan MK atas permohonan judicial review terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ketenagalistrikan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Nomor 002/PUU-I/2003, dan Putusan Uji materi UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004.

Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 34/20.

Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Hak Asasi Manusia Atas Tanah dan Sumber Daya Alam.

Webdocuments dan Internet

Adiwijaya, Setiawan, *Walhi Kecam Newmont Buang Limbah di Laut Sawu*, <https://nasional.tempo.co/read/738085/walhi-kecam-newmont-buang-limbah-di-laut-sawu> diakses pada 19 Desember 2023.

Ahdiat, Adi, *10 Sektor Usaha Penopang Utama Ekonomi RI Kuartal I 2024*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/07/10-sektor-usaha-penopang-utama-ekonomi-ri-kuartal-i-2024>, diakses pada 11 Mei 2024.

Antara Babel, *Husain Karim Tolak Tambang Timah Pasir Padi*, <https://babel.antaranews.com/berita/5134/husain-karim-tolak-tambang-timah-pasir-padi> diakses 19 Desember 2023.

Arif, Irwandi, *Memasuki Era Pertambangan Indonesia Melalui Tambang Bawah Tanah*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. <https://bdtbt.esdm.go.id/wp-content/uploads/2021/04/20210421-Webinar-BDTBT-Tambang-Bawah-Tanah-di-Indonesia-21-April-2021.pdf>. diakses pada 8 Januari 2024.

CNBC Indonesia, *Ini Peran Industri Batu Bara ke Ekonomi Nasional & Daerah*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221004113736-17-377028/ini-peran-industri-batu-bara-ke-ekonomi-nasional-daerah> diakses pada 19 Desember 2023.

CNBC Indonesia, *Ribuan Izin Tambang Dicabut Jokowi, Begini Nasibnya Sekarang*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220926131515-4-374976/ribuan-izin-tambang-dicabut-jokowi-begini-nasibnya-sekarang> diakses pada 19 Desember 2023.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, *Grand Strategy Mineral dan Batu Bara*, <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-grand-strategy-komoditas-minerba.pdf> diakses pada 9 Mei 2024.

Fadhillah, F., *Hak atas lingkungan yang baik dan sehat dalam kontek mutu udara Jakarta*, [Ice.or.id/wp.content/upload/Brief-ICEL](https://www.ice.or.id/wp-content/uploads/Brief-ICEL) diakses pada 20 Maret 2024.

Guritno, T & Meiliana, D., *Kesimpulan Komnas HAM soal Wadas: Terjadi Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan Berlebihan Aparat Kepolisian*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/25/06242221/kesimpulan-komnas-ham-soal-wadas-terjadi-kekerasan-dan-penggunaan-kekuatan?page=all> diakses pada 16 Mei 2024.

- Harris, R.F., Advokat konstitusi, Menilik Aneka Kontroversi Dalam Pasal 162 Revisi UU Minerba, <https://advokatkonstitusi.com/menilik-aneka-kontroversi-dalam-pasal-162-revisi-uu-minerba/3/> diakses pada 24 Desember 2023.
- Imelda, *Ekonomi Babel Menggeliat, Angka Pengangguran Turun 0,22 Persen*, https://babelprov.go.id/berita_detil/ekonomi-babel-menggeliat-angka-pengangguran-turun-022-persen diakses pada 11 Mei 2024.
- International Council on Mining and Metals, *ICMM Mining Principles*, <https://www.icmm.com/en-gb/our-principles> diakses pada 20 Mei 2024.
- International Council on Mining and Metals, *Mining Principles*, <https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/mining-principles.pdf?cb=59962> diakses pada 20 Mei 2024.
- ITB, *What is Sustainable Development Goals (SDGs)?*, <https://sdgsc.itb.ac.id/what-is-sdgs/> diakses pada 20 Desember 2023.
- Jatmiko, Hadi., *Rekam Jejak Kasus Pertambangan di Indonesia*, <https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/REKAM-JEJAK-KASUS-PERTAMBANGAN.pdf> diakses pada 15 Mei 2024.
- Kaltim Today, *Dinilai Banyak Merusak Lingkungan, Aktivis Tolak Perpanjangan Kontrak PT Kaltim Prima Coal*, <https://kaltimtoday.co/dinilai-banyak-merusak-lingkungan-aktivis-tolak-perpanjangan-kontrak-pt-kaltim-prima-coal> diakses 19 Desember 2023.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Tembus Rp300,3 Triliun, PNBPN Sektor ESDM di 2023 Lampau Target*, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tembus-rp3003-triliun-pnbp-sektor-esdm-di-2023-lampau-target> diakses pada 11 Mei 2024.
- Komnas HAM. *Komnas HAM Pantau Dampak Lingkungan Akibat Aktivitas PT Global Pasific Utama di Muara Enim*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/7/25/924/komnas-ham-pantau-dampak-lingkungan-akibat-aktivitas-pt-global-pasific-utama-di-muara-enim.html> diakses pada 14 Mei 2024.
- Melsasail, Ibek., *Tambang Pada Dinamika Perekonomian Maluku*, <https://www.tribun-maluku.com/tambang-pada-dinamika-perekonomian-maluku/01/19/> diakses pada 12 Mei 2024.
- Mulyadi, *Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia*, <https://unida.ac.id/artikel/perlindungan-hak-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-dan-sehat-sebagai-bagian-dari-hak-asasi-manusia> diakses pada 19 Desember 2023

- Natalia, Tasya., *Kontribusi NCKL Bawa Ekonomi Maluku Utara Jadi Nomor 1 di RI*, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230922152027-128-474808/kontribusi-nckl-bawa-ekonomi-maluku-utara-jadi-nomor-1-di-ri>, diakses pada 12 Mei 2024.
- Prabawati, *Jumlah Angkatan Kerja di Kaltim Naik*, <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/statistik/jumlah-angkatan-kerja-di-kaltim-naik> diakses pada 11 Mei 2024.
- Pratama, Sandy Indra, *Mendedah Angka Seputar Potensi Emas di Blok Wabu Papua*, <https://betahita.id/news/detail/6542/mendedah-angka-seputar-potensi-emas-di-blok-wabu-papua.html.html> diakses pada 19 Desember 2023.
- Putri, Gloria Setyavani, *Berkunjung ke Kampoeng Reklamasi Air Jangkang, Galian Bekas Tambang Disulap Jadi Lahan Konservasi*, <https://regional.kompas.com/read/2022/07/02/164236078/berkunjung-ke-kampoeng-reklamasi-air-jangkang-galian-bekas-tambang-disulap?page=all> diakses 9 Januari 2024.
- Rahayu, *Industri Nikel di Halmahera Diduga Melanggar HAM dan Merusak Lingkungan*, <https://bisnis.tempo.co/amp/1822637/industri-nikel-di-halmahera-diduga-melanggar-ham-dan-merusak-lingkungan> diakses pada 14 Mei 2024.
- Sucahyo, Nurhadi, *Limbah Tailing Freeport Rusak Lingkungan, Hancurkan Kehidupan*, <https://www.voaindonesia.com/a/limbah-tailing-freeport-rusak-lingkungan-hancurkan-kehidupan-/6943257.html> diakses pada 19 Desember 2023.
- The Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development, *Mining Policy Framework*, hlm 1 <https://www.iisd.org/system/files/2023-12/igf-mining-policy-framework-en.pdf> diakses pada 20 Mei 2024.
- The Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development, *Guidance Notes IGF Mining Policy Framework*, <https://www.iisd.org/system/files/2023-12/igf-mining-policy-framework-en.pdf> diakses pada 20 Mei 2024.
- Walhi, *Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas*, <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas#:~:text=Lebih%20parah%20lagi%2C%20terlihat%20dari,hingga%20sebesar%20100%20juta%20rupiah>. diakses pada 24 Desember 2023.
- Wardhana, W., *Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara*, <http://academia.edu> diakses tanggal 2 Agustus 2023.

Wicaksono, Raden Ariyo, *Perusahaan Tambang Indominco Dituding Bunuh Sungai di Kaltim*, <https://betahita.id/news/detail/6245/perusahaan-tambang-indominco-dituding-bunuh-sungai-di-kaltim.html.html> diakses 19 Desember 2023.

Zensumbawa, *Lubang Tambang Newmont Minus 240 Meter di Bawah Laut*, <https://www.samaware.com/2015/09/lubang-tambang-newmont-minus-240-meter-di-bawah-laut/> diakses pada 19 Desember 2023.